

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahnya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian, Cetakan I*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK*, Jakarta.
- Rabiatul Adawiyah & Siti Maisyarah. *Sistem Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Implementasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan*, Solok : Mafy Media Literasi Indonesia, 2026.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rudi Kurniawan & Siti Maisyarah. *Kebijakan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Administrasi Publik*, Solok : Mafy Media Literasi Indonesia, 2026.
- Siti Maisyarah & Rahmat Asri Sufa. *Ekonomi Publik Kontemporer: Dari Konsep Dasar Hingga Kebijakan Anggaran Negara*, Solok : Mafy Media Literasi Indonesia, 2025.
- Siti Maisyarah & Rahmat Asri Sufa. *Riset Ilmiah Modern : Teori Dan Praktik Metodologi Penelitian*, Banjar : Ruang Karya Bersama, 2026.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syed Husen Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kedua.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.

C. Skripsi, Artikel Dan Karya Ilmiah Lainnya

Almendo, Meldy Ance. "Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan." *Yuridika* 31.1 (2016): 58-81.

Amin, Khoirul. "Perlindungan Hukum terhadap penetapan status tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi manusia." *JOSH: Journal of Sharia* 3.01 (2024): 1-18.

- Amtiran, Mese Andre, Saryono Yohanes, and Yohanis G. Tuba Helan. "Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *JURNAL HUKUM PROYURIS* 7.nomor 1 (2025): 50-61.
- Anjari, Warih. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49.4 (2020): 432-442.
- Ariani, Choirunnisa. "Tinjauan Yuridis Pencalonan Legislatif Mantan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1.1 (2023): 29-38.
- Ariany, Lisda, and Sandi P. Perdana. "Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5.12 (2024).
- Arifin, Djohar. "ANALISA HUKUM TERHADAP KONSEKUENSI UPAYA HUKUM KASASI MENGENAI PUTUSAN BEBAS MURNI DALAM TINDAK PIDANA (Suatu Studi Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kendari)." *Sultra Law Review* (2024): 3262-3274.
- Astomo, Putra. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1.1 (2018): 1-12.
- Aunuh, Nu'man, et al. "Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia." *Syiah Kuala Law Journal* 4.3 (2020): 285-301.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.
- CahyaSupena, Cecep Cahya Supena. "Tinjauan tentang konsep negara hukum indonesia pada masa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9.2 (2023): 372-388.
- Choirunnisa Ariani, *Tinjauan Yuridis Pencalonan Legislatif Mantan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal et Ordo, Vol. 1, No. 1, Oktober, 2023.
- Dewi, Sumartini, et al. "Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7.12 (2024): 4568-4573.
- Fahrul Rinaldi, *Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

- Faika, Aura Alviyatul, et al. "URGENSI PERAN DAN FUNGSI KONSTITUSI DALAM MENJAMIN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DI INDONESIA." *EDUCATE (Jurnal Pendidikan dan Sosial)* ISSN: 2301-5101 1.5 (2026).
- Fazil Septian Siregar, Putusan Bebas Perkara Pidana dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Putusan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn.), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.
- Fitria, Annisa, and Nur Apipah. "Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5.2 (2025): 2672-2682.
- Fitrotul Janah, Alma, Mabursyah Mabursyah, and Sidiq Aulia. Analisis Kebijakan Diperbolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Fiqih Siyasah. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
- Hadi, Fikri. "Negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1.2 (2022): 170-188.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas kepastian hukum menurut para ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II (2021).
- Hamidi, Jazim. "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23.4 (2016): 652-671.
- Hanifah, Ida. "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17.2 (2020): 193-208.
- Hardiyanto, Muhammad Lutfi, Shalahudin Serba Bagus, and Ahmad Munir. "Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis terhadap Putusan MK. No. 42/PUU-XIII/2015)." *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1.2 (2017): 106-122.
- Haris, Oheo Kaimuddin, et al. "Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi." *Halu Oleo Legal Research* 6.3 (2024): 755-772.
- Huroiroh, Ernawati, and Vera Rimbawani Sushanty. "Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia." *Jurnal Legisia* 14.2 (2022): 191-203.

- Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Jurnal Al'Adl, Vol. IX, No. 3, Desember, 2017.
- Indah, Reviana Mutiara, and Irwan Triadi. "Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.4 (2025).
- Iswari, Fauzi. "Aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6.1 (2020): 127-140.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi. "Hukum antar waktu (HAW) dalam UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 30 tahun 2014." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9.3 (2023): 1780-1791.
- Jou Rapolin Simatupang, Haposan Siallagan, dan Kasman Siburian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi: Calon Anggota Legislatif Periode 2019-2024)*, Jurnal UHN, Vol. 8, No. 1, April, 2019.
- Jufri, Muhammad. "Konstitusionalitas calon legislatif mantan narapidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Bawaslu DKI* 8.1 (2023): 47-68.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019): 13-22.
- Kurniawan, Iwan, Felicitas Sri Marniati, and Irhamsah Irhamsah. "KEPASTIAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERITAH DKI JAKARTA DENGAN PIHAK PENGEMBANG TERKAIT PEMENUHAN KEWAJIBAN FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM YANG TELAH DISETUJUI DALAM SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH (SIPPT)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3.2 (2024): 622-632.
- Maghfiroh, Kholifatul, Lita Tyesta Alw, and Retno Saraswati. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota DPR, DPD Dan DPRD Serta Sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah." *Diponegoro Law Journal* 7.2 (2018): 104-121.
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi bagi korban tindak pidana: Sebuah tawaran mekanisme baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45.1 (2016): 53-75.
- Matompo, Osgar S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat." *Jurnal media hukum* 21.1 (2014): 16-16.

- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, et al. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3.1 (2023): 211-230.
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan hak konstitusional di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8.2 (2021): 183-192.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 1-20.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.3 (2022): 402-417.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal." *Jurnal Konstitusi* 19 (2023).
- Pura, Margo Hadi, and Hana Faridah. "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Sasana* 7.1 (2021): 79-95.
- RI, Sekretariat Jenderal MPR. "Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945." Jakarta: Perum Percetakan Negara (2002).
- Rustini, Rustini, and Iza Rumesten. "Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Lex LATA* (2020).
- Sakila Nadia Nur, Urgensi Pemberian Grasi Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.
- Salsabila, Aizahra Dafa, Muktiono Muktiono, and Faizin Sulistio. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Mantan Narapidana untuk Menjadi Notaris." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 8.2 (2023): 168-178.
- Salsabila, Aizahra Dafa, Muktiono Muktiono, and Faizin Sulistio. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Mantan Narapidana untuk Menjadi Notaris." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 8.2 (2023): 168-178.

- Samuel, Rio, and I. Dewa Gede Dana Sugama. "Pengaturan Pidana Pengganti Pidana Denda Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4.01 (2025).
- Santa Katarina, Celia. "Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia." *Sapientia Et Virtus* 4.1 (2019): 82-102.
- Santoso, M. Agus. "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA"* 3.01 (2011).
- Simamora, Janpatar. "Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 547-561.
- Sinaga, Dearma, et al. "Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Terhadap Keuangan Negara Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Dr. Fl. Tobing Sibolga)." *USU Law Journal* 3.2 (2015): 43-58.
- Sinaga, Niru Anita. "Fungsi Filosofis, Yuridis Dan Ekonomis Kontrak Dalam Dunia Bisnis." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15.2 (2025). DOI: <https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1604>
- Siregar, Rudi Efendy. "Kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2022): 373-385.
- Solechan, Solechan. "Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2.3 (2019): 541-557.
- Suhaimi, Suhaimi. "Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif." *Jurnal Yustitia* 19.2 (2018).
- Tiffany, Deandra, et al. "Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ragam Pengabdian* 3.1 (Spesial Issue) (2026): 5228-5237.
- Wahyuono, Arifin, et al. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Rechts* 14.2 (2025): 373-396.
- Widjiastuti, Agustin. "Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN." *Jurnal Perspektif* 22.2 (2017): 96-110.
- Widodo, Agus. "Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia." *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 12.1 (2016).

- Wijaya, Alviano Boyko, Grace Dea Cahya, and Gregorius Hari Saputra. "Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Saat PSBB Di Tengah Darurat Kesehatan Pandemi Covid-19." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 6.2 (2021): 141-157.
- WIRATAMA, ARIF DERMAWAN. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan terhadap Terpidana Korupsi. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Yasin, Rahman. "Hak konstitusional penegakan hak politik pemilih dalam Pemilu Serentak 2024 berdasarkan konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4.2 (2022): 186-199.
- Yolanda, Elvara, Usman Usman, and Elly Sudarti. "Pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3.2 (2022): 125-145.
- Zaini, Ahmad. "Negara hukum, demokrasi, dan ham." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 11.1 (2020): 13-48.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum." *Smart Law Journal* 2.2 (2023): 114-123.